



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C SANGATTA**

PENGANTAR

Salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Dalam kaitannya dengan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih terkait dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Sangatta sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja di bawah Unit Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan secara berjenjang Laporan Kinerja atas berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023 sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Satuan Kerja.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023, diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan fungsi tugas yang diamanatkan kepada KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta, sehingga dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak - pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kinerja seiring dengan meningkatnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Sangatta, 23 Januari 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Anggara

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	3
B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2023	4
BAB I PENDAHULUAN	7
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
D. Peran Strategis Organisasi	8
E. Sumber Daya Organisasi	8
F. Sistematika Pelaporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Penetapan Perjanjian Kinerja.....	11
1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2023	11
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
1. Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta TA 2023	13
2. Capaian Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta Tahun 2023	14
B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023.....	16
C. Realisasi Anggaran	40
D. Kinerja Lainnya.....	41
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	47
A. Formulir Pengukuran Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta.....	47
B. Hasil Survey Kepuasan Pengguna Jasa	48

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Tabel 1 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Kode	IKU
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai
8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai

No	Sasaran Strategis	Kode	IKU
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2023

Kendala:

1. Terdapat risiko Nilai tingkat efisiensi anggaran yang rendah dikarenakan penyesuaian terhadap rincian output yang saling mempengaruhi
2. Terdapat risiko stakeholder menyampaikan rasa tidak puas terhadap sarana dan prasarana kantor melalui kotak saran dan kritik kantor
3. Terdapat risiko berkas perkara dikembalikan jaksa dan Kekalahan gugatan pra peradilan
4. Terdapat risiko nilai Kepuasan Pengguna Jasa turun dari tahun sebelumnya
5. Terdapat risiko indikasi fraud/ penyelewengan pada pelaksanaan tugas
6. Terdapat risiko pengawasan terhadap ekspor produk CPO yang kurang optimal
7. Terdapat risiko jumlah jam pelajaran / diklat pegawai masih kurang dari target tahunan yang diberikan
8. Terdapat risiko belum tersedianya anggaran dan SDM untuk Kapal Patroli Bea dan Cukai Sangatta
9. Terdapat risiko ketersediaan SDM dengan spesifikasi pejabat perbendaharaan masih kurang
10. Terdapat risiko kerusakan Barang Milik Negara yang ada pada Kantor Bea dan Cukai Sangatta
11. Terdapat risiko timbulnya resistensi Fisik dalam Proses Penindakan dari masyarakat umum pada proses penindakan
12. Terdapat risiko kecelakaan kerja saat melaksanakan kegiatan pengawasan
13. Terdapat risiko target yang ditetapkan melebihi proyeksi penerimaan

14. Terdapat risiko pelayanan kurang optimal terhadap pengguna jasa yang mendapat fasilitas tersebut
15. Terdapat risiko tidak tercapainya pelaksanaan program kerja PRKC
16. Terdapat risiko gangguan malware pada komputer pegawai
17. Terdapat risiko UMKM gagal melakukan ekspor perdana
18. Terdapat risiko kegiatan komunikasi dan edukasi dengan pengguna jasa berjalan tidak efektif
19. Terdapat risiko tingkat pemantauan pengendalian internal yang dilaksanakan tidak memadai/ tidak sesuai yang sudah ditargetkan
20. Terdapat risiko realisasi tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Fungsional tidak selesai pada akhir tahun
21. Terdapat risiko kurangnya pemahaman pegawai terhadap penyusunan IKI
22. Terdapat risiko arahan Kepala Kantor/Pimpinan pada rapat Dialog Kinerja Organisasi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun melewati batas waktu yang telah ditentukan (OFF TRACK)
23. Terdapat risiko kualitas pelayanan yang kurang maksimal karena kurangnya inovasi
24. Terdapat risiko adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum
25. Terdapat risiko loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi

Strategi:

1. Melakukan penghematan secara terus menerus dalam pelaksanaan anggaran
2. Melakukan pemantauan anggaran yang dilakukan mulai dari awal periode tahun berjalan
3. Menaikkan nilai kepuasan pengguna jasa dengan melengkapi sarana dan prasarana yang ada
4. Membuat checklist pemberkasan upaya paksa
5. Meningkatkan sinergi dengan Pengadilan Negeri Sangatta
6. Menaikkan nilai kepuasan pengguna jasa dengan memperbaiki prosedur pelayanan
7. Mengintensifkan internalisasi tentang integritas
8. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan terkait pemeriksaan CPO
9. Studi banding terkait tatacara pemeriksaan komoditi CPO bersama unit pelayanan ke kantor dengan proses bisnis yang sama
10. Melakukan monitoring jumlah jam pelajaran pegawai tiap semester

11. Permintaan Diklat/ Workshop/ PJJ mengenai pelatihan awak sarana pengangkut
12. Mengirimkan kembali ND permintaan usulan mengikuti Diklat/Workshop/PJJ mengenai pejabat perbendaharaan
13. Monitoring kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan BMN
14. Melaporkan checklist standar keselamatan kerja pada saat pengawasan kepada atasan langsung
15. Melaksanakan internalisasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja
16. Surat permintaan rencana kegiatan kepada kontributor penerimaan
17. Menyusun dan mengirimkan prognosa penerimaan di triwulan IV
18. Meningkatkan pemahaman pegawai dan pengguna jasa terhadap ketentuan fasilitas
19. Sosialisasi kepada pegawai tentang Security Awareness dan Pemeliharaan rutin
20. Sosialisai dan asistensi mengenai tatalaksana ekspor kepada pelaku UMKM
21. PKP terkait SPI
22. Diklat/Workshop/PJJ terkait SPI
23. Melakukan Review Temuan APF pada tahun-tahun sebelumnya
24. Melaksanakan Review Temuan APF pada kantor lain di lingkungan Kanwil Kalbagtim
25. Intenalisasi kepada pegawai terhadap penyusunan IKI
26. Monitoring Arahan Kepala Kantor oleh unit PIC
27. Reminder Pemantauan Penyelesaian Arahan Kepala Kantor pada unit PIC"
28. Melakukan inovasi yang membantu mempermudah pelayanan
29. Melaksanakan Internalisasi terkait Antikorupsi dan Anti Gratifikasi
30. Melaksanakan Internalisasi terkait Kode Etik dan Perilaku ASN

BAB I

PENDAHULUAN

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
7. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta terdiri dari:

1. Subbagian Umum;
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
3. Seksi Perbendaharaan;
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis;
5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Peran Strategis Organisasi

Sebagai Fasilitator Perdagangan Internasional (*Trade Facilitator*) dan Pendukung Industri (*Industrial Assistance*) KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta mempunyai peran memfasilitasi perdagangan internasional (*Trade Facilitator*) dan memberikan dukungan terhadap industri dengan baik. Selain itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta juga berperan sebagai instansi pemungut penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai (*Revenue Collector*) serta peran sebagai pelindung masyarakat dari barang-barang berbahaya sehingga dapat menjaga keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (*Community Protector*).

E. Sumber Daya Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta masih memiliki ketersediaan sumber daya organisasi berupa Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan dan pelayanan. Pada tahun 2023, terdapat 38 pegawai yang terdiri dari satu Pejabat Eselon III, tiga Pejabat Eselon IV, empat Pejabat Fungsional, dan 29 pelaksana. Adapun sarana dan prasarana penunjang meliputi Gedung kantor, kendaraan operasional roda empat dan roda dua, sarana prasarana teknologi informasi berupa perangkat komputer dan jaringan internet. Mengingat Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan berpenduduk sebanyak 434.459 jiwa (hasil Sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur 2020) dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata 4,08% setiap tahunnya, ketersediaan Sumber Daya Organisasi yang memadai sangatlah penting untuk mendukung pencapaian kinerja yang maksimal.

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta disusun sebagai berikut:

1. Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

Sajian ini berisi intisari laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan atau pimpinan instansi pelapor, tanpa harus membaca seluruh isi laporan sudah dapat memperoleh informasi yang menyeluruh atas:

A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Pada bagian ini berisi ringkasan pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2023 (dibuat dalam bentuk tabel).

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2023

Pada bagian ini berisi kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran beserta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut.

3. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut.

A. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi;

B. Peran Strategis Organisasi;

C. Sumber Daya Organisasi;

D. Sistematika Pelaporan.

4. Bab II Rencana Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut:

A. Rencana Strategis

1. Pernyataan visi dan misi;
2. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan;
3. Penetapan tujuan dan sasaran;
4. Program, kegiatan, dan rencana aksi.

B. Penetapan Kinerja

Tabel berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan target sesuai dengan Perjanjian Kinerja *Kemenkeu-Three* KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta Tahun 2023.

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat pertanggungjawaban atas kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta selama tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi

KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta menggunakan nilai Capaian Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu-Three* dengan besaran target dan realisasi untuk periode selama tahun 2023.

B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023

Berisi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023 beserta Analisis Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk membiayai program, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini capaian, inovasi, dan penghargaan yang diraih Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta selama Tahun Anggaran 2023.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

7. Lampiran

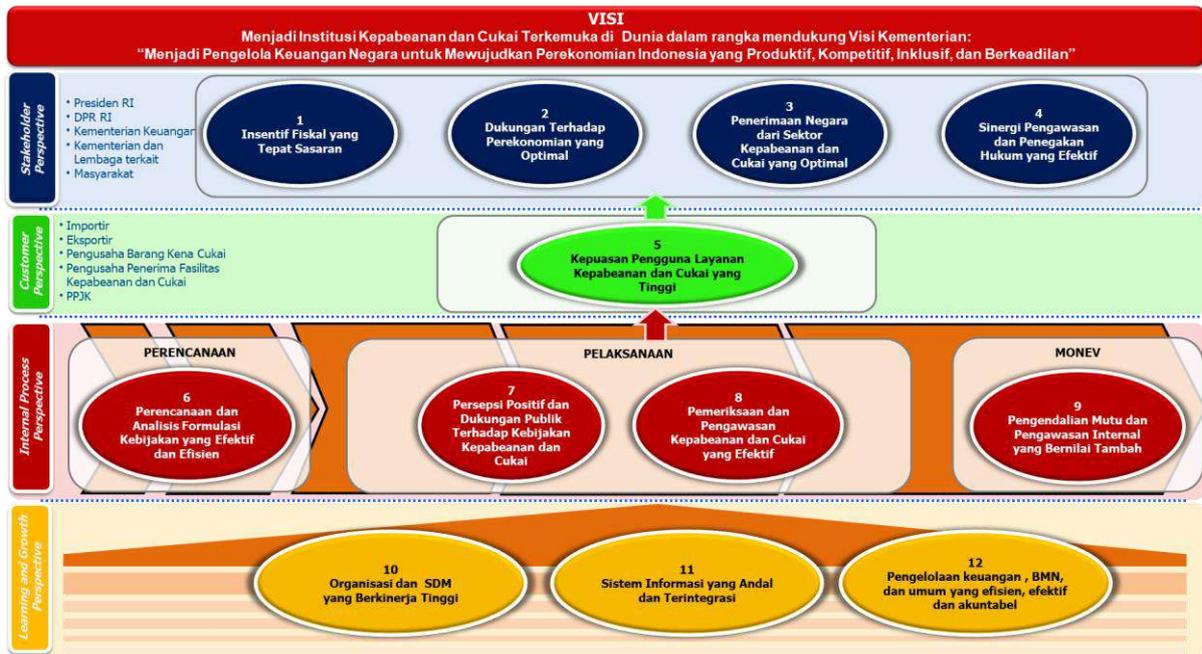
Bagian ini memuat data, dokumen, tabel, gambar, serta lampiran-lampiran lainnya yang dibutuhkan sebagai pendukung laporan akuntabilitas kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2023



Gambar 1 : Peta Strategi Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta Tahun 2023

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Kode	IKU
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

No	Sasaran Strategis	Kode	IKU
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai
8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

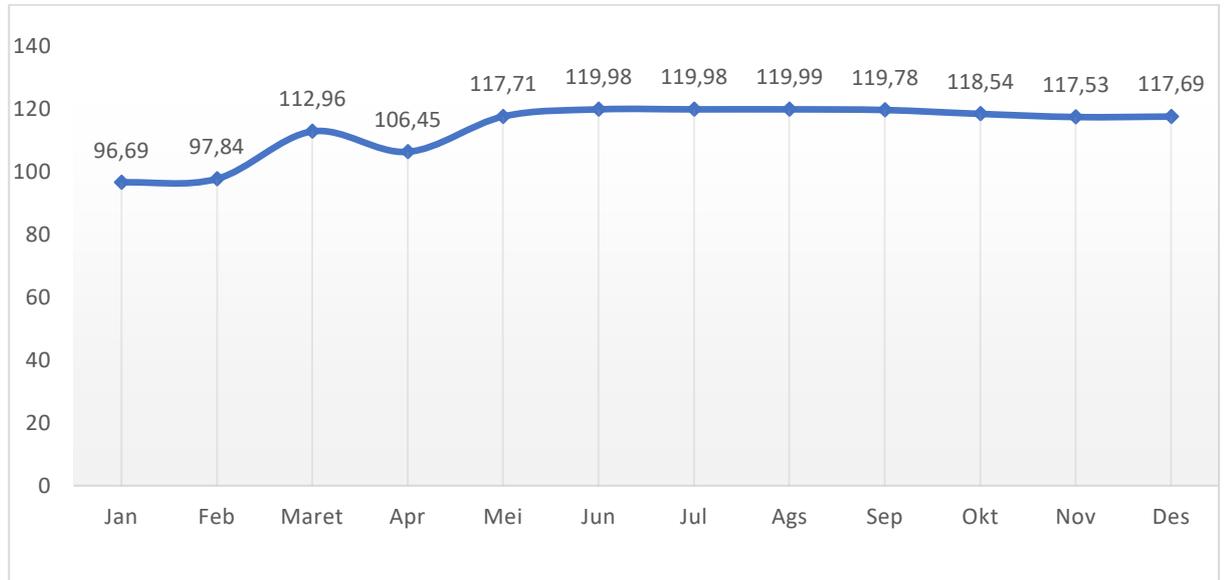
A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta TA 2023

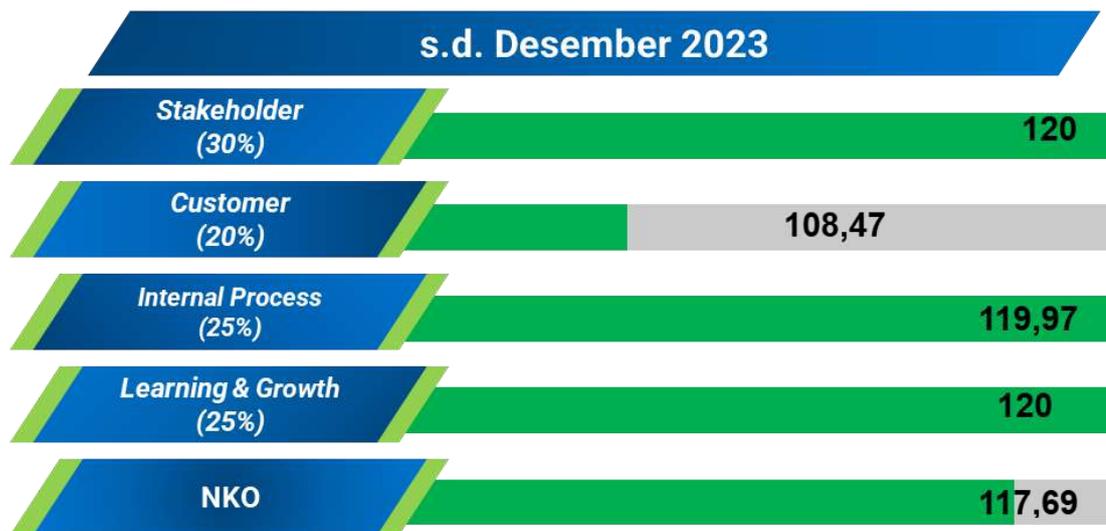
Sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta tahun 2023 tertuang dalam Rencana Strategis yang terdiri dari 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah 15 (lima belas) IKU berstatus hijau dan satu IKU berstatus abu-abu. Adapun Nilai Kinerja Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta adalah sebesar 117,69%.



Gambar 2: Status Capaian Indikator Kinerja Utama KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta Tahun 2023



Gambar 3: Perkembangan Bulanan Nilai Kinerja Organisasi



Gambar 4: Rincian Nilai Kinerja Organisasi

2. Capaian Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta Tahun 2023

Tabel 3 : Target dan Realisasi Capaian Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta Tahun 2023

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran			120
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84%	105%	120

2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			120
2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	103,75%	120
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			120
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	121,45%	120
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	107,14%	120
<i>Customer Perspective</i>				
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			108,47
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,37	4,74	108,47
<i>Internal Process Perspective</i>				
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	98,67%	120
7	Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			119,89
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	95,83	119,78
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	105%	120
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			120
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	105,54%	120
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			120
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	N/A	N/A
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120
<i>Learning and Growth Perspective</i>				
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			120
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	104,32%	120
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	99,7%	120
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	84,5	103	120
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			120
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	100%	120
12	Pengelolaan anggaran yang optimal			120

12a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	120 (98,21%)	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				117,69

B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023

Analisis kinerja dimaksudkan untuk mengetahui atau mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta, dengan membandingkan antara target yang dibebankan dengan realisasi pencapaian.

Tabel 4: Perbandingan Capaian Kinerja 2021-2023

Kode	Deskripsi	Tahun		
		2021	2022	2023
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran			
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	-	-	120
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			
2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	-	120	120
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	120	120	120
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	120	120	120
<i>Customer Perspective</i>				
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	103,9	106,42	108,47
<i>Internal Process Perspective</i>				
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	120	120
7	Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	109,24	105,89	119,78
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	-	-	120
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	120	120	120
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	N/A	N/A	N/A
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	110,8	110,5	120
<i>Learning and Growth Perspective</i>				
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	120	120	120
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	120	114,25	120
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	109,65	110,15	120
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	120	120	120
12	Pengelolaan anggaran yang optimal			
12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	99,52	100,12	120

Adapun capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan

Mengukur Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan berupa KB ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Keberhasilan pemberian fasilitas yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1. Keberlangsungan Usaha dengan bobot 10%
2. Jumlah Tenaga Kerja dengan bobot 20%
3. Rasio Ekspor terhadap Impor dengan bobot 40%
4. Rasio Produksi terhadap Impor dengan bobot 20%
5. Pemenuhan Dukungan untuk Hilirisasi dengan bobot 5%
6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi dengan bobot 5%
7. Asistensi dengan bobot 10%
8. Tindak Lanjut dengan bobot 10%

Dikarenakan kondisi Kawasan Berikat yang tidak memenuhi perhitungan komponen 2 dan 4 maka diganti dengan komponen Analisis Kondisi KB dengan bobot 60%

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Laporan tentang Hasil Analisis Kondisi Perusahaan Kawasan Berikat PT. PSS Triwulan II pada tanggal 3 Juli 2023 (LAP-26/KBC.160404/PaBC.4/2023)
2. Laporan tentang Hasil Analisis Kondisi Perusahaan Kawasan Berikat PT. PSS Triwulan III pada tanggal 2 Oktober 2023 (LAP-39/KBC.160404/PaBC.4/2023)
3. Laporan tentang Hasil Analisis Kondisi Perusahaan Kawasan Berikat PT. PSS Triwulan IV pada tanggal 3 Januari 2024 (LAP-5/KBC.160404/PaBC.4/2024)
4. Asistensi kepada PT. PSS pada tanggal 30 Mei 2023 (ST-174/KBC.1604/2023)
5. Penyampaian Matriks Data dan Informasi Triwulan II pada tanggal 5 Juli 2023 (ND-551/KBC.1604/2023)
6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi Triwulan III pada tanggal 2 Oktober 2023 (ND-761/KBC.1604/2023)
7. Penyampaian Matriks Data dan Informasi Triwulan IV pada ND-29/KBC.1604/2024 tanggal 3 Januari 2024

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **105%** dengan target **84%** dan indeks capaian sebesar **120**.

b. Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur sebagaimana komponen berikut:

1. Analisis Pendahuluan dengan bobot 5%
2. Asistensi dan Tindak Lanjut dengan bobot 40%
3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut dengan bobot 50%
4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi dan Hasil Asistensi dengan bobot 5%

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Penyampaian Usulan Daftar Sasaran Bersama Bersama Program UMKM Kemenkeu Satu KPPBC TMP C Sangatta Tahun 2023 pada tanggal 17 Februari 2023
2. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi Triwulan I pada tanggal 6 April 2023 (ND-321/KBC.1604/2023)
3. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi Triwulan II pada tanggal 4 Juli 2023 (ND-538/KBC.1604/2023)
4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi Triwulan III pada tanggal 3 Oktober 2023 (ND-763/KBC.1604/2023)
5. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi Triwulan IV pada tanggal
6. Laporan Pelaksanaan Asistensi UMKM Berisi kendala pada tanggal 19 Mei 2023
7. Bimbingan Teknis Pengiriman Barang Sampel Ke Luar Negeri Dan Pembuatan Dokumen Pelengkap Ekspor Melalui Jasa Kiriman (CN/PEB) pada tanggal 22 Mei 2023
8. Ekspor Perdana Okusa (AWB 4Q XKLA) Fedex Express pada tanggal 29 Juli 2023
9. Ekspor Perdana Bedda Lotong (PEB 265749 tanggal 26/07/2023) pada tanggal 27 Juli 2023
10. Ekspor Kedua Bedda Lotong (PEB 344060 tanggal 03/10/2023) pada tanggal 3 Oktober 2023

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **103,75%** dengan target **81%** dan indeks capaian sebesar **120**.

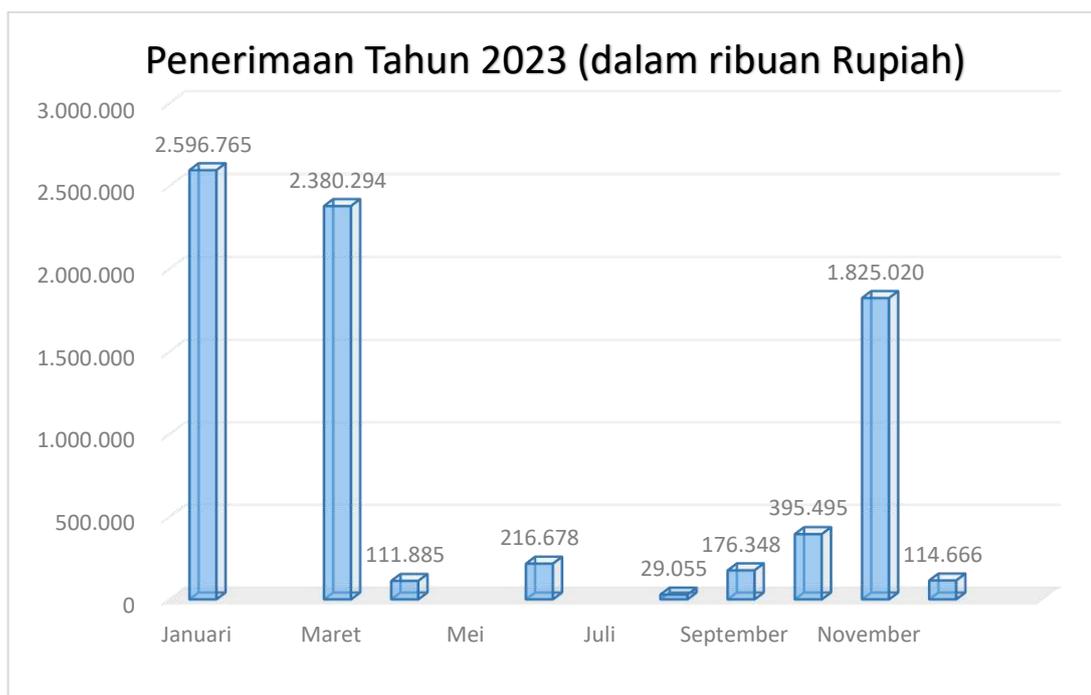
c. Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Pada tahun 2023 realisasi pelaksanaan penghimpunan penerimaan negara sebesar Rp7.846.562.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari target penerimaan ditetapkan sebesar Rp6.460.981.00,- (enam milyar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan KEP-49/WBC.16/2023 tanggal 20 Januari 2023.

Penerimaan diatas terdiri dari :

Tabel 5 Rincian Penerimaan Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan	Jumlah Penerimaan
1	Bea Masuk	Rp 5.591.414.000,-
2	Bea Keluar	Rp 2.142.848.000,-
3	Denda Administrasi Pabean	Rp 10.000.000,-
4	Denda Administrasi Cukai	Rp 102.300.000,-
Total		Rp7.846.562.000



Gambar 5: Realisasi Penerimaan per Bulan

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **121,45%** dengan target **100%** dan indeks capaian sebesar **120**.

d. Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegahan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

1. Persentase Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Penyidikan adalah rangkaian tugas dan fungsi dalam rangka mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti terjadinya tindak pidana kepabeanaan dan cukai guna menemukan perbuatan pidana, alat bukti yang cukup, dan tersangka pelaku tindak pidana. Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai. Status P21 adalah status berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, serta siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P21 adalah berkas perkara pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP. SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan tentang proses penyidikan yang dinyatakan berhenti berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan, karena:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;

c. Penghentian penyidikan demi hukum.

Untuk mencapai penyidikan sampai dengan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, diperlukan kelengkapan administrasi dalam proses penindakan sampai dengan proses penyidikan sehingga semua berkas dalam proses penyidikan lengkap dan dapat diterima oleh kejaksaan.

Pada tahun 2023 KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta, realisasi capaian IKU Persentase Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21) adalah N/A dikarenakan tidak terdapat SPDP dan Pra peradilan atas upaya paksa yang telah dilakukan dalam penegakan aturan kepabeanan dan cukai.

2. Persentase Efektivitas Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal (BKC HT) adalah semua kegiatan pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok, cerutu, klembak, klobot, dan hasil pengolahan tembakau lainnya) yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal Barang Kena Cukai Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja.

Komponen pada IKU ini antara lain:

1. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dengan bobot 15%
2. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dengan bobot 30%
3. Pembobotan Barang Hasil Penindakan dengan bobot 15%
4. Tindak Lanjut Penindakan dengan bobot 40%

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Penindakan berdasarkan PRIN-63/KBC.1604/2022 tanggal 30 Desember 2022 pada tanggal 13, 18, 24, 27, dan 30 Januari 2023.
2. Penindakan berdasarkan PRIN-09/KBC.1604/2023 tanggal 30 Januari 2023 pada tanggal 9, 10, 12, 20, dan 21 Februari 2023.
3. Penindakan berdasarkan PRIN-19/KBC.1604/2023 tanggal 28 Februari 2023 pada tanggal 9, 14, 20, 23, dan 24 Maret 2023.
4. Penindakan berdasarkan PRIN-22/KBC.1604/2023 tanggal 29 Maret 2023 pada tanggal 11, 12, 13, 17,19,27, dan 29 April 2023.

5. Penindakan berdasarkan PRIN-25/KBC.1604/2023 tanggal 28 April 2023 pada tanggal 15, 19 dan 30
6. Penindakan dalam rangka Operasi Gempur berdasarkan PRIN-27/KBC.1604/2023 tanggal 16 Mei 2023 pada tanggal 30 dan 31
7. Penindakan dalam rangka Operasi Gempur berdasarkan PRIN-27/KBC.1604/2023 tanggal 16 Mei 2023 pada tanggal 8,9,15,24-26
8. Penindakan berdasarkan PRIN-30/KBC.1604/2023 tanggal 27 Juni 2023 pada tanggal 17, 24, 30,31
9. Penindakan berdasarkan PRIN-32/KBC.1604/2023 tanggal 28 Juli 2023 pada tanggal 10 dan 31
10. Penindakan berdasarkan PRIN-37/KBC.1604/2023 tanggal 30 Agustus 2023 pada tanggal 05, 11, 20, 21, 22, 27,28 September 2023
11. Penindakan berdasarkan PRIN-42/KBC.1604/2023 tanggal 20 September 2023 pada tanggal 25 dan 26 September 2023
12. Penindakan Berdasarkan PRIN-42/KBC.1604/2023 tanggal 20 September 2023 pada tanggal 4,5,6,11,12,18 dan 19 Oktober 2023
13. Penindakan Berdasarkan PRIN-43/KBC.1604/2023 tanggal 29 September 2023 pada tanggal 23 Oktober 2023
14. Penindakan Berdasarkan PRIN-45/KBC.1604/2023 tanggal 31 Oktober 2023 pada tanggal 16,17,27 dan 28 November 2023
15. Penindakan Berdasarkan PRIN-47/KBC.1604/2023 tanggal 31 Oktober 2023 pada tanggal 7,8,13,14,15,22 dan 23 November 2023
16. Penindakan Berdasarkan PRIN-48/KBC.1604/2023 tanggal 29 November 2023 pada tanggal 5,8,12,13 dan 26 Desember 2023

Untuk detail capaian IKU tersebut antara lain :

1. Jumlah Realisasi Pelaksanaan Pengawasan BKCHT Ilegal sebesar 48
2. Jumlah Rencana Pengawasan BKCHT Ilegal sebesar 10
3. Indeks Pembobotan BHP sebesar 3
4. Target Indeks Pembobotan BHP sebesar 3
5. Skor Tindak Lanjut Ba Penegahan dan SBP sebesar 128
6. Jumlah BA Penegahan dan SBP sebesar 116

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **107,14%** dengan target **78,5%** dan indeks capaian sebesar **120**.

e. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil Kegiatan Survey Kepuasan Pengguna Jasa yang dilaksanakan oleh Tim Survei Direktorat Kepatuhan Internal. Adapun kegiatan survey tersebut pada tahun 2023 dilakukan secara daring. Pengukuran indeks kepuasan pengguna jasa dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dengan Formula dalam pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Indeks dan Kategori Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Indeks	Kategori
1 – 1,80	Tidak Puas
1,81 – 2,60	Kurang Puas
2,61 – 3,40	Cukup Puas
3,41– 4,20	Puas
4,21 – 5,00	Sangat Puas

Terdapat 4 indikator penilaian dalam mengukur Indeks Kepuasan Pengguna Jasa, yaitu:

1. Sistem dan Prosedur Pelayanan
2. Pegawai dan Petugas Pelayanan
3. Sarana dan Prasarana Kantor
4. Layanan Informasi

Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim Tahun 2023, KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta adalah sebesar 4,84 (sangat puas). Hasil capaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



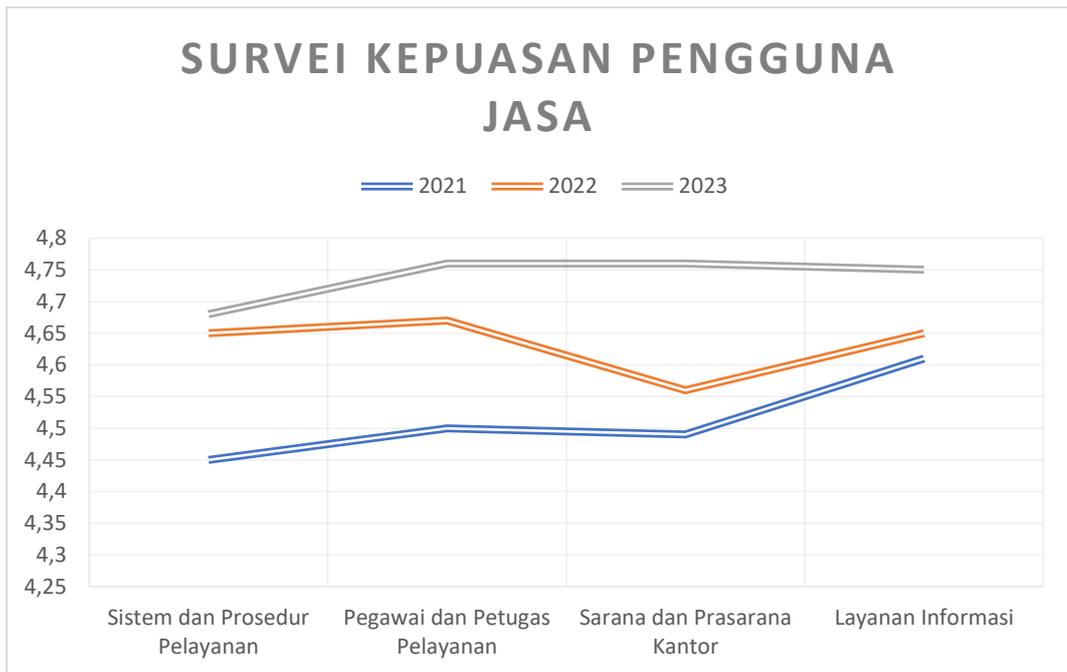
Survei Kepuasan Penqguna Jasa KPPBC Sangata Tahun 2023



Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	4,68	Sangat Puas	0,03	
<i>Kejelasan Persyaratan Administrasi</i>	4,65	<i>Sangat Puas</i>	-0,04	II
<i>Kejelasan Prosedur Pelayanan</i>	4,71	<i>Sangat Puas</i>	0,09	II
<i>Kemudahan Prosedur Pelayanan</i>	4,76	<i>Sangat Puas</i>	0,14	IV
<i>Kejelasan Biaya Pelayanan</i>	4,59	<i>Sangat Puas</i>	-0,03	II
<i>Kecepatan Waktu Pelayanan</i>	4,71	<i>Sangat Puas</i>	0,02	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	4,76	Sangat Puas	0,09	
<i>Keramahan dan Kesopanan Pegawai</i>	4,89	<i>Sangat Puas</i>	0,00	I
<i>Kedisiplinan Pegawai</i>	4,67	<i>Sangat Puas</i>	0,00	III
<i>Kecepatan Petugas Pelayanan</i>	4,78	<i>Sangat Puas</i>	0,11	IV
<i>Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan</i>	4,78	<i>Sangat Puas</i>	0,11	IV
<i>Keadilan Petugas Pelayanan</i>	4,78	<i>Sangat Puas</i>	0,22	IV
<i>Integritas Pegawai</i>	4,67	<i>Sangat Puas</i>	0,11	III
Sarana dan Prasarana Kantor	4,76	Sangat Puas	0,20	
<i>Kenyamanan Loket Pelayanan</i>	4,67	<i>Sangat Puas</i>	0,00	III
<i>Kebersihan Kantor</i>	4,89	<i>Sangat Puas</i>	0,33	IV
<i>Kenyamanan Ruang Tunggu</i>	4,89	<i>Sangat Puas</i>	0,33	IV
<i>Kenyamanan Toilet</i>	4,67	<i>Sangat Puas</i>	0,23	III
<i>Kejelasan Tata Ruang</i>	4,67	<i>Sangat Puas</i>	0,11	III
<i>Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya</i>	4,78	<i>Sangat Puas</i>	0,22	IV
Layanan Informasi	4,75	Sangat Puas	0,10	
<i>Ketersediaan Layanan Informasi</i>	4,71	<i>Sangat Puas</i>	0,09	II
<i>Kejelasan Layanan Informasi</i>	4,76	<i>Sangat Puas</i>	0,14	I
<i>Kemudahan Mendapatkan Informasi</i>	4,76	<i>Sangat Puas</i>	-0,01	I
<i>Kemudahan Menyampaikan Pengaduan</i>	4,76	<i>Sangat Puas</i>	0,14	I
Indeks Kepuasan	4,74	Sangat Puas	0,10	
Faktor Koreksi	0,00		0,00	
Indeks Akhir	4,74	Sangat Puas	0,10	

Gambar 6 Hasil SKPJ Tahun 2023

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **4,74** dengan target **4,37** dan indeks capaian sebesar **108,47**.



Gambar 7 Hasil SKPJ Tahun 2021 s.d. 2023

f. Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC

Program Reformasi Kepabebean dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari penguatan integritas dan kelembagaan, penguatan pelayanan dan pemeriksaan, penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran, dan peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen berikut ini:

1. Kualitas Perencanaan Program (25%)
yang terdiri dari penilaian Kualitas perencanaan program rutin sebesar 50% dan Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan sebesar 50%,
2. Penyelesaian Program (70%)
dengan uraian Program PRKC yang wajib dilaksanakan sebesar 60% dan Program kerja mandiri pendukung PRKC sebesar 40%, serta
3. Pelaporan sebesar 5%.

Sepanjang tahun 2023 rincian realisasi tiap komponennya sebagai berikut:

1. Terdapat 11 IKU yang didukung oleh program kerja
2. Hasil penilaian matriks penyelerasan sebesar 89,3

3. Hasil penilaian perencanaan program pendukung PRKC dari Dit. PPS sebesar 94,67
4. Seluruh program dapat dilaksanakan
5. Pelaporan dilaksanakan secara lengkap

Pada tahun 2023, capaian kualitas perencanaan program adalah sebesar 94,66%, capaian penyelesaian program sebesar 100%, dan capaian pelaporan sebesar 100%. Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **98,67%** dengan target **80%** dan indeks capaian sebesar **120**.

g. Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Kegiatan komunikasi dan edukasi yang efektif bertujuan mengukur tingkat saluran komunikasi unit kerja dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Kegiatan Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai. Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

Sedangkan Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya.

Pada IKU tersebut telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan 7 dari 7 rencana kegiatan sosialisasi secara luring
2. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi daring berupa kegiatan penyebaran konten *Employee Advocacy* sejumlah 26 konten dengan memenuhi syarat minimal *baseline*
3. Telah dilaksanakan 4 kegiatan Edukasi dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Tata Cara Pengiriman Barang Sample ke Luar Negeri dengan total nilai bobot 86,64
 - b. Sosialisasi Peraturan Manifest dan Training Pengoperasian Modul Manifest dengan total nilai bobot 95,17
 - c. APBN WEEK dengan total nilai bobot 92,58

d. Bimbingan Teknis Persiapan Ekspor 92,06

Tabel 7 : Uraian Penilaian Kegiatan Edukasi

Periode	Kegiatan	Materi (35%)	Narasumber (30%)	Acara (30%)	Total
Q1	Sosialisasi Tata Cara Pengiriman Barang Sample ke Luar Negeri	84,5	87,83	88,33	86,84
Q2	Sosialisasi Peraturan Manifest dan Training Pengoperasian Modul Manifest	95,13	95,13	95,25	95,17
Q3	APBN WEEK	90,25	94,38	93,38	92,58
Q4	Bimbingan Teknis Persiapan Ekspor	93,75	91,04	91,25	92,06
Rata – rata					91,66

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **95,83 %** dengan target **80%** dan indeks capaian sebesar **119,79**.

h. Persentase Realisasi dari Janji Layanan Kepabeanaan dan Cukai

Pada tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-286/KBC.1604/2022, KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta menerapkan janji layanan yaitu:

1. Pelayanan Permohonan Izin Pemuatan Barang Ekspor Curah (Form 3D) dengan Standar Waktu Layanan 2,5 hari kerja;
2. Pelayanan Persetujuan/Penolakan Izin Timbun Barang Impor di Tempat Lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara dengan Standar Waktu Layanan 2,5 hari kerja;
3. Pelayanan Penyelesaian Perbaikan Data PEB dengan Standar Waktu Layanan 3 hari kerja;
4. Pelayanan Penyelesaian Izin Bongkar dengan Standar Waktu Layanan 3 hari kerja;
5. Penelitian Dokumen Impor Jalur Merah dengan Standar Waktu Layanan 12 jam kerja (terhadap PIB dengan jumlah item dibawah 50) atau 24 jam kerja (terhadap PIB dengan jumlah item diatas 50);
6. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Perbaikan dan Pembatalan BC 1.0 dan BC. 1.1 dengan Standar Waktu Layanan 12 Jam kerja;
7. Pelayanan Penyelesaian Penerbitan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) atas Jaminan dengan Standar Waktu Layanan 12 jam kerja;
8. Kegiatan Analyzing Point dengan Standar Waktu Layanan 3 jam kerja;

9. Layanan Informasi dan Konsultasi dengan Standar Waktu Layanan 60 menit (tidak memerlukan konfirmasi unit lain) atau 180 menit (memerlukan konfirmasi pihak lain);
10. Layanan Pendaftaran Imei barang Penumpang dengan Standar Waktu Layanan 3 jam kerja.

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan. Selama tahun 2023, KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta telah memberikan pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8: Data Layanan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tahun 2023

Jenis Layanan	Jumlah
Layanan Dokumen PIB	47 Dokumen
Layanan Dokumen PEB	1058 Dokumen
Layanan Analyzing Point	1105 Dokumen
Layanan Perbaikan Data PEB	101 Dokumen
Layanan Dokumen Impor Jalur Merah	3 Dokumen
Layanan Perbaikan dan Pembatalan BC 1.0/BC 1.1	69 Dokumen
Layanan Persetujuan Timbun Barang Impor	40 Dokumen
Layanan Persetujuan Bongkar Barang Impor	17 Dokumen
Layanan Persetujuan Muat Barang (Form 3D)	952 Dokumen
Layanan Penerbitan Bukti Jaminan (BPJ)	8 Dokumen

Atas seluruh dokumen tersebut selama tahun 2023 telah dilakukan penyelesaian oleh petugas bea dan cukai dengan tepat waktu pada tahun berjalan.

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan. Inovasi Layanan atas Permohonan Izin Timbun, Izin Bongkar, Perbaikan Data PEB, Izin Muat, dan Perbaikan data BC 1.0 sudah menggunakan Email sejak Tahun 2020. Untuk hasil SKPJ pada tahun 2023 atas komponen Sistem dan Prosedur Layanan dan Pegawai dan Petugas Pelayanan nilai survei lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **105%** dengan target **81%** dan indeks capaian sebesar **120**.

i. Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya. Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:

- 1) Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC
- 2) Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal
- 3) Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut.
- 4) Data historis NHI, informasi lainnya (untuk patroli), LI-1 (informasi dari masyarakat), tertangkap tangan (pada tahun sebelumnya).

Capaian IKU dihitung menggunakan komponen sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Patroli dengan bobot 15%
- 2) Pelaksanaan Operasi dengan bobot 10%
- 3) Efektivitas Pelaksanaan Patroli dengan bobot 10%
- 4) Efektivitas Pelaksanaan Operasi dengan bobot 25%
- 5) Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi dengan bobot 40%

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 9 : Pelaksanaan Kegiatan Patroli dan/atau Operasi Penindakan

Jenis Kegiatan	Jumlah
Pelaksanaan Patroli Penindakan	17
Rencana Pelaksanaan Patroli Penindakan	12
Pelaksanaan Operasi Penindakan	57
Rencana Pelaksanaan Operasi Penindakan	63
BA dan SBP Penegahan	143
Skor Tindak Lanjut BA dan SBP Penegahan	155,5

Pelaksanaan patroli dan operasi penindakan selama tahun 2023 menghasilkan penegahan dengan uraian nilai barang sebesar Rp1.440.134.000,- dengan nilai kerugian negara sebesar Rp983.975.353,-. Adapun jumlah Barang Kena Cukai Ilegal yang ditegah adalah 1.136.500 batang rokok dan 225 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **105,54%** dengan target **75%** dan indeks capaian sebesar **120**.

j. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti yaitu:

- 1) Hasil audit oleh Inspektorat Jendereal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral;
- 2) Hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI) selain audit terhadap Laporan Keuangan;
- 3) Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pada tahun 2023 KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta, realisasi capaian IKU persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional masih N/A karena tidak terdapat temuan dari Aparat Pengawas Fungsional. Adapun dalam kurun waktu tahun 2020-2023 realisasi capaian IKU persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional adalah N/A dengan keadaan tidak terdapatnya temuan dari Aparat Pengawas Fungsional.

k. Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata - rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
3. Persentase efektivitas pemantauan pengendalian utama
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja

5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukuman disiplin

1. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (A)

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 Oktober 2023 (non operasional) dan 1 Januari s.d. 30 November 2023 (operasional) ditambah saldo pengaduan tahun 2023 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2023 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2023.

Jumlah pengaduan yang selesai diproses adalah jumlah pengaduan yang dianggap selesai diproses pada tahun 2023 dari pengaduan yang diterima.

Pengaduan telah ditindaklanjuti apabila:

- a) Untuk Pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) telah diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC, KPPBC, BPIB dan PSO);
- b) Untuk Pengaduan masyarakat operasional telah diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai diproses, apabila:

- a) Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
- b) Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
- c) Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
- d) Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 3 pengaduan masyarakat di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta melalui portal SIPUMA dan semuanya sudah ditindaklanjuti.

2. PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS (B)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Temuan PKPT terdiri dari:

- 1) Ketidaksesuaian objek PKPT dengan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, keputusan, dan/atau ketentuan lain; dan/atau
- 2) Ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan/atau ketidakekonomisan objek PKPT.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada:

1. Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT; dan/atau
2. Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi yang dibuat dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal oleh Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dan/atau Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait. Pada tahun 2023 KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta melaksanakan PKPT sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Penatausahaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOKPPN) pada Triwulan II menghasilkan 2 Rekomendasi
2. Pelayanan, Penelitian, dan Penatausahaan RKSP, Inward Manifest, & Outward Manifest pada Triwulan IV menghasilkan 3 Rekomendasi

Sampai pada akhir tahun 2023 seluruh rekomendasi PKPT telah ditindaklanjuti secara memadai oleh unit kerja terkait.

3. PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA (C)

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dari waktu ke waktu. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan berkelanjutan

dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan/supervise oleh manajemen yang melekat dalam operasi normal suatu entitas. Evaluasi terpisah pada Kementerian Keuangan dioptimalkan melalui pemantauan pengendalian utama dan pemantauan Efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan yang dilakukan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intern.

Pada tahun 2023 KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) dengan obyek sebagai berikut :

1. Pengelolaan fasilitas Impor Sementara
2. Penatausahaan BHP
3. Pemeriksaan Dokumen Impor

Dari kegiatan diatas sepanjang tahun 2023 menghasilkan 1 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti

4. EVALUASI PENGELOLAAN KINERJA (D)

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021 tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian atas unsur Evaluasi Kinerja Sistem (System Performance Evaluation) dan Evaluasi Kinerja Strategis (Strategic Performance Evaluation). Hasil akhir penilaian dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluatee diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluatee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Evaluee harus menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi dan Evaluator harus memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh evaluee tersebut.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari Unit Kerja tempat dilaksanakannya evaluasi pengelolaan kinerja telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal dengan surat kepala Unit Kerja terkait.

Pada tahun 2023, Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja terhadap Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, dengan hasil nilai empat area berada di level 5 dan satu area berada di Level 4 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 : Rincian Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Kertas Kerja		Area Penilaian	Level Maksimal	Hasil	Level
Strategis	1	<i>Base Model (Model Dasar)</i>	5	4,95	5,00
	2	Penerjemahan dan Keselarasan	5	5,00	5,00
	3	Penjabaran dan Kualitas	5	5,00	5,00
Administrasi	4	Pengadministrasian	5	4,93	5,00
Teknis	5	Peran dan Dukungan Setiap Pegawai	5	34,05	4,00

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **100%** dengan target **80%** dan indeks capaian sebesar **120**.

I. Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2023 adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Pada tahun 2023 terdapat 11 kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

Tabel 11 : Daftar Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai

No	Materi	Jumlah Peserta	Jumlah Efektif	Nilai	Realisasi
1.	Identifikasi Keaslian Pita Cukai	17	17	9,47	97,35%
2.	Pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan Mandiri NIK dengan NPWN	24	24	9,75	98,75%
3.	Microsoft Teams dan API Host-to-Host CEISA 4.0	15	15	9,60	98,00%
4.	Evaluasi Pengelolaan Kinerja	10	10	9,90	99,50%
5.	Standar Layanan Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor CPO	15	15	9,73	98,50%
6.	Program JKN untuk Perlindungan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah	15	15	9,87	99,33%
7.	Pengendalian Gratifikasi	8	8	8,87	94,35%
8.	Security Awareness dan Collaboration Tools	35	35	9,69	98,45%
9.	Layanan Mandiri Digital KPPBC TMP C Sangatta	20	20	9,70	98,50%
10.	Tata Cara Perhitungan Draught Survey dan Teknik Pengambilan Sampel Uji Barang	10	10	10	100%
11.	Pengendalian Gratifikasi dan Program PRKC Berkelanjutan	13	13	9,84	99,20%

Sampai dengan bulan Desember 2023 telah dilaksanakan Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan sebanyak 4 pegawai dari total 4 pegawai yang termasuk dalam

perhitungan. Sedangkan untuk Tingkat Implementasi *Learning Organization (LO)* sampai dengan bulan Desember 2023 telah mencapai nilai 98,37% dari hasil Nilai *Self Assessment LO* dan Nilai Survei *LO*.

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **104,31%** dengan target **80%** dan indeks capaian sebesar **120**.

m. Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

1) Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Untuk mengukur tingkat efektivitas Pelaksanaan DKO ada beberapa indikator penilaian yang harus dipenuhi, Unsur penilaian efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kehadiran pimpinan unit (indeks capaian 10%)
2. Surat undangan (indeks capaian 10%)
3. Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (15%)
4. Absensi peserta rapat (5%)
5. Lembar Capaian Kinerja (LCK) (20%)
6. Risalah rapat (15%)
7. Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)
8. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (indeks capaian 10%)
9. (Pelaksanaan DKO (Poin 1-8) x 50%) + (Jumlah Arahan yang telah ditindaklanjuti / Jumlah Arahan x 50%)

Telah dilaksanakan DKO sebanyak 12 kali dengan rincian sebagai berikut :

- Periode Januari (ND-114/KBC.1604/2023 tanggal 30 Januari 2023);
- Periode Februari (ND-201/KBC.1604/2023 tanggal 28 Februari 2023)
- Periode Maret (ND-279/KBC.1604/2023 tanggal 31 Maret 2023)
- Periode April (ND-342/KBC.1604/2023 tanggal 31 April 2023)
- Periode Mei (ND-417/KBC.1604/2023 tanggal 30 Mei 2023)
- Periode Juni (ND-513/KBC.1604/2023 tanggal 30 Mei 2023)
- Periode Juli (ND-599/KBC.1604/2023 tanggal 27 Juli 2023)
- Periode Agustus (ND-663/KBC.1604/2023 tanggal 30 Agustus 2023)
- Periode September (ND-747/KBC.1604/2023 tanggal 29 September 2023)
- Periode Oktober (ND- 841/KBC.1604/2023 tanggal 30 Oktober 2023)
- Periode November (ND-926/KBC.1604/2023 tanggal 29 November 2023)
- Periode Desember (ND- 1/KBC.1604/2024 tanggal 1 Januari 2023)

Adapun selama periode 2023, terdapat 13 arahan Kepala Kantor dan dari total arahan tersebut seluruhnya telah diselesaikan.

2) Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi pelaksanaan rapat MR, penyampaian laporan, realisasi mitigasi, dan TkPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **99,7%** dengan target **81%** dan indeks capaian sebesar **120**.

n. Indeks Efektivitas Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Administrator

FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD dan pemberian arahan baik yang bersifat strategis maupun bersifat operasional sehingga tata kelola unit kerja menjadi lebih optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Pada IKU ini terdapat 2 komponen yaitu kegiatan FGD dan Kegiatan Pemberian arahan dan tata Kelola unit kerja.

Pada tahun 2023 tidak ada pelaksanaan kegiatan FGD. Untuk kegiatan tata Kelola unit kerja sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi oleh kepala kantor terhadap para pejabat dan pegawai pada awal tahun
2. Pelaksanaan identifikasi dan analisis arahan tujuan organisasi oleh pejabat pengawas dan dinilai oleh pejabat administrator
3. Pelaksanaan monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai melalui form untuk memonitoring kendala pada pelaksanaan kinerja
4. Pelaksanaan pembinaan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai oleh pejabat administrator pada setiap triwulan

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **103%** dengan target **84,5%** dan indeks capaian sebesar **120**.

o. Persentase pengelolaan layanan TIK

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi yang merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti Malware, Phising, atau Hacking) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi:
 - a) Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA, serta
 - b) Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.
2. Pemanfaatan collaboration tools bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja secara kolaborasi. Tingkat pemanfaatan collaboration tools perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tools telah digunakan secara efektif oleh pengguna di Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi peningkatan pemanfaatannya dalam pekerjaan.
3. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA yang merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan.

Adapun data kinerja pengelolaan layanan TIK KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta adalah sebagai berikut:

Tabel 12 : Data Kinerja Pengelolaan Layanan TIK

Join Domain	
PC yang memenuhi persyaratan join domain	34
PC yang telah join domain	34
Konfigurasi Alamat IP Statis	
PC dengan alamat IP Statis dan MAC Address	20
Pemanfaatan <i>Collaboration Tools</i>	
Jumlah Pegawai yang telah menggunakan 3 Service	38
Layanan TIK	
Total pengajuan layanan	271

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **100%** dengan target **82%** dan indeks capaian sebesar **120**.

p. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran atas pagu neto, pencapaian keluaran riil, efisiensi, dan konsistensi.

Melihat data diatas untuk capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar **120** dengan target **100** dan indeks capaian sebesar **120**.

C. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi di KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta, semua program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan dibiayai dengan sumber dana DIPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.281.455.000,00. Realisasi belanja barang, dan modal pada tahun 2023 sebesar Rp 2.141.313.918

Tabel 13 Rincian Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto

PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO	
Uraian	Nilai
Pagu Bruto	2.281.455.000
Faktor pengurang	-
a.Belanja pegawai	-
b.Self-blocking	-
Hasil Refocussing	-
c.Hasil efisiensi	-
(pagu objek efisiensi – realisasi objek efisiensi)	

d.Dana khusus	-
Pagu Neto	2.281.455.000
Realisasi s.d Desember 2022	2.141.313.918
% Realisasi terhadap Pagu Netto	93,86%

Pada pelaksanaannya untuk mendukung capaian IKU tersebut telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan revisi DIPA dikarenakan adanya penarikan dana dari beberapa kantor vertikal salah satunya KPPBC TMP C Sangatta dalam hal ini akun belanja modal berupa sisa pembelian kendaraan roda 4 oleh Kantor Pusat. Hal ini untuk melaksanakan optimalisasi dan efisiensi sumberdaya yang utamanya digunakan untuk perbaikan rumah negara beberapa kantor vertikal
2. Melakukan efisiensi sumber daya berupa penyesuaian nominal DIPA pada masing-masing akun dalam hal ini bertujuan agar penyerapan pada setiap akun agar optimal
3. Melakukan efisiensi sumber daya dengan melakukan Lock (kunci) pada beberapa mata akun anggaran, sehingga tidak ada anggaran yang keluar dari akun yang dikunci tersebut, dilakukannya efisiensi adalah juga sebagai bentuk upaya dari Bea Cukai Sangatta memperoleh nilai IKKPA yang baik, IKKPA merupakan penggabungan dari nilai IKPA dan SMART, kemudian efisiensi menyumbang 20% dari penilaian (SMART)

D. Kinerja Lainnya

1. Pemusnahan Barang Hasil Penindakan dan Arsip

Bea Cukai Sangatta laksanakan pemusnahan Barang Hasil Penindakan Tahun 2022 dan 49 Bundel Arsip. Pemusnahan ini dihadiri oleh Aparat Penegak Hukum yang lain (Kepala KPKNL Bontang, Kepala KP2KP Sangatta, Kapolsek Sangatta Utara, Dansubdenpom, dan Danramil Sangatta Utara).

Pada pemusnahan kali ini dilakukan terhadap 369.320 Batang Hasil Tembakau dan 69 MMEA dengan nilai barang Rp. 425.271.800 dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp. 261.602.703.



Gambar 8 Kegiatan Pemusnahan BHP dan Arsip

2. Peresmian Kapal Patroli “Gadingga”

KPPBC TMP C Sangatta mendapatkan armada patrol laut baru yang diberi nama kapal patrol “Gadingga”. Merupakan unit transportasi laut berupa Speedboat dengan Nomor BC 10018, dibuat tahun 2013. Hibah dari Kantor Bea Cukai Banjarmasin dan akan dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan pada wilayah perairan Kutai Timur. Dengan adanya satu armada tambahan baru ini, diharapkan dapat lebih membantu dalam tugas dan fungsi Bea Cukai Sangatta utamanya pada unit Pengawasan dan Penindakan.



Gambar 9 Kapal Patroli Gadingga

3. Ekspor Perdana UMKM “Bedda Lottong”

Bea Cukai Sangatta bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur melepas ekspor produk UMKM berupa lulur khas suku bugis "Bedda Lotong" Henny Beauty.

Pelepasan ekspor perdana produk kecantikan Henny Beauty ini merupakan bukti nyata bahwa UMKM di Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar dan mampu menembus pasar internasional.



Gambar 10 Ekspor Perdana Bedda Lottong

4. Pengamanan Aset BMN Berupa Legalisasi Kepemilikan Tanah

Bea Cukai Sangatta menerima kunjungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Timur dalam rangka serah terima sertifikat tanah milik Kantor Bea Cukai yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No.265, Kutai Timur pada Rabu, (04/10). Penyerahan sertifikasi diserahkan oleh Kepala BPN Kutai Timur, Murad Abdullah kepada Kepala Kantor Bea Cukai Sangatta, Wahyu Anggara di Kantor Bea Cukai Sangatta. Sertifikat tanah tersebut adalah bentuk legalitas kepemilikan tanah kantor Bea Cukai Sangatta sebagai Aset BMN yang resmi.



Gambar 11 Penyerahan Sertifikat Tanah oleh BPN

5. Bimbingan Teknis Persiapan Ekspor

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur (Diskop UKM Kutim) menggelar Bimbingan Teknis Persiapan Ekspor. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 25 peserta dan akan berlangsung selama dua (2) hari mulai (31/10/2023 - 1/11/2023) di Aula Korsa KPPBC TMP C Sangatta. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi dari Bea Cukai Sangatta yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Seksi PKCDT, Margono selaku narasumber dan Gifari Azka D. selaku moderator. Margono menyampaikan bahwa Bea Cukai adalah kawan UMKM. Sehingga apabila ada UMKM yang berencana untuk ekspor, Bea Cukai siap mendampingi UMKM dalam menjalankan proses ekspor. Selain materi peran Bea Cukai dalam membina UMKM, disampaikan juga cerita sukses dari UMKM Ramayana, Henny Beauty dengan produk Bedda Lotong. Bimtek Persiapan Ekspor siap berdaya saing, siap menembus pasar nasional dan mancanegara. Perlu diketahui juga bahwa seluruh layanan yang tersedia pada KPPBC TMP C Sangatta tidak dipungut biaya apapun.



Gambar 12 Kegiatan Bimtek Persiapan Ekspor

6. Meraih predikat “Menuju Informatif” pada Lomba Keterbukaan Informasi Publik se-Provinsi Kalimantan Timur

Bea Cukai Sangatta mengikuti lomba Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Di Lomba Keterbukaan Informasi Publik se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, pada Kategori Instansi Vertikal Kabupaten Kota, Bea Cukai Sangatta memperoleh klasifikasi Menuju Informatif dengan skor 81,13. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.



Gambar 13 Kegiatan Malam Penganugerahan Acara Keterbukaan Informasi Publik

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam sasaran-sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaan kinerja organisasi tahun 2023, dari 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) Ikhtisar Capaian Kinerja pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta yang berjumlah 16, status Indikator Kinerja Utama s.d. Desember 2023 yaitu 15 hijau dan 1 abu-abu. Yang berarti 15 dari Ikhtisar Capaian Kinerja sudah tercapai dan 1 sisanya tidak terdapat capaian. Melihat data tersebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 117,69.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pihak internal, *stakeholder* dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan evaluasi dan peningkatan kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta di masa mendatang.

LAMPIRAN

A. Formulir Pengukuran Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran			120
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	84%	105%	120
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			120
2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	103,75%	120
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal			120
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	121,45%	120
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78,5%	107,14%	120
<i>Customer Perspective</i>				
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi			108,47
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,37	4,74	108,47
<i>Internal Process Perspective</i>				
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	98,67%	120
7	Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai			119,89
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	95,83	119,78
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	81%	105%	120
8	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			120
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	75%	105,54%	120
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			120
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	N/A	N/A

9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120
<i>Learning and Growth Perspective</i>				
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			120
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	104,32%	120
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	99,7%	120
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	84,5	103	120
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			120
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	100%	120
12	Pengelolaan anggaran yang optimal			120
12a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	120 (98,21%)	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				117,69

B. Hasil Survey Kepuasan Pengguna Jasa

Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	4,68	Sangat Puas	0,03	
<i>Kejelasan Persyaratan Administrasi</i>	4,65	Sangat Puas	-0,04	II
<i>Kejelasan Prosedur Pelayanan</i>	4,71	Sangat Puas	0,09	II
<i>Kemudahan Prosedur Pelayanan</i>	4,76	Sangat Puas	0,14	IV
<i>Kejelasan Biaya Pelayanan</i>	4,59	Sangat Puas	-0,03	II
<i>Kecepatan Waktu Pelayanan</i>	4,71	Sangat Puas	0,02	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	4,76	Sangat Puas	0,09	
<i>Keramahan dan Kesopanan Pegawai</i>	4,89	Sangat Puas	0,00	I
<i>Kedisiplinan Pegawai</i>	4,67	Sangat Puas	0,00	III
<i>Kecepatan Petugas Pelayanan</i>	4,78	Sangat Puas	0,11	IV
<i>Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan</i>	4,78	Sangat Puas	0,11	IV
<i>Keadilan Petugas Pelayanan</i>	4,78	Sangat Puas	0,22	IV
<i>Integritas Pegawai</i>	4,67	Sangat Puas	0,11	III
Sarana dan Prasarana Kantor	4,76	Sangat Puas	0,20	
<i>Kenyamanan Loket Pelayanan</i>	4,67	Sangat Puas	0,00	III
<i>Kebersihan Kantor</i>	4,89	Sangat Puas	0,33	IV
<i>Kenyamanan Ruang Tunggu</i>	4,89	Sangat Puas	0,33	IV
<i>Kenyamanan Toilet</i>	4,67	Sangat Puas	0,23	III
<i>Kejelasan Tata Ruang</i>	4,67	Sangat Puas	0,11	III
<i>Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya</i>	4,78	Sangat Puas	0,22	IV
Layanan Informasi	4,75	Sangat Puas	0,10	
<i>Ketersediaan Layanan Informasi</i>	4,71	Sangat Puas	0,09	II
<i>Kejelasan Layanan Informasi</i>	4,76	Sangat Puas	0,14	I
<i>Kemudahan Mendapatkan Informasi</i>	4,76	Sangat Puas	-0,01	I
<i>Kemudahan Menyampaikan Pengaduan</i>	4,76	Sangat Puas	0,14	I
Indeks Kepuasan	4,74	Sangat Puas	0,10	
Faktor Koreksi	0,00		0,00	
Indeks Akhir	4,74	Sangat Puas	0,10	



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI